

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori dan Teori Peradilan*. Kencana, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deddy Mulyadi, 2016, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*. Prakarsa, Bandung.
- Imam Anshori Saleh, 2014, *konsep Pengawasan Kehakiman*. Setara Press, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*. Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta.
- _____, 2010, *Perihal Undang-Undang*. Raja Grafindo Press, Jakarta
- _____ dan Ali safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- M. Nasir, 2005, *Hukum Acara Perdata*. Djambatan, Jakarta.
- Made Nurmawati dan I Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2017, *Buku Saku Kuliah: Jenis Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *Buku Panduan E-court*. Mahkamah Agung, Jakarta.
- _____, 2021, *Buku Panduan E-court*. Mahkamah Agung, Jakarta.
- Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- _____ dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta

Suteki dan Galang Taufani, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Grafindo Persada, Depok.

Yudi Latif, 2015, *Negara Paripurna: Sejarah, Rasionalitas dan Aktualitas dari Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG).

Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen (RV).

Reglement Burgerlijke Stand Christen Indonesisch.

Reglement op het houden der Register van den Burgerlijke stand voor de Chineezen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Perkawinan Jo PP No. 9 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

JURNAL

Agus Satory, 2020, "*Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan*". Pakuan Law Review, Vol. 6 No. 1, Januari 2020.

Bernadette Mulyati Waluyo, 2020, "*Asas Terbuka Untuk Umum dan Kehadiran Fisik Para Pihak Dalam Sidang Di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 6 No. 1, Juni 2020.

Budianto Eldist Daud Tamin, 2018, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*". Lex Administratum, Vol. 6 No. 3, Agustus 2018

Edi Lisdiyono, 2017, *“Improving Legal Argument Critically in the Litigation Mechanism in Indonesia”*. Sriwijaya Law Review, Vol. 1, Issue. 1, Januari 2017.

Emma Cunliffe, 2012, *“Open Justice: Concepts and Judicial Approaches”*. Federal Law Review, Vol. 40, Issue. 3, September 2012.

Gamal Abdul Nasir, 2017, *“Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat”*. Jurnal Hukum Replik, Vol. 5, No. 2, September 2017.

Woro Harkandi Kencana dan Meisyanti, 2019, *“Kreativitas Digital dalam Political Marketing”*. Tegur Digital dalam Dominasi Generasi Milenial, Vol. 1, No. 11, Maret 2019.

Zil Aidi, 2020, *“Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien”*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 1, Januari 2020.

MAJALAH

Mahkamah Agung. 2022, *“DANDAPALA Penjaga Keadilan,” e-BERPADU* (September – Oktober 2022), hal. 18-28.

SUMBER INTERNET

Abdullah. *“Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum”*, <https://mahkamahagung.go.id>, dikunjungi pada 3 Februari 2022 Jam 14.00 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *“E-court”*, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, dikunjungi pada 3 Februari 2022 Jam 19.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *“Elektronik”*, <https://kbbi.web.id/elektronik>, dikunjungi pada 1 Februari 2022 Jam 21.00 WIB.

Rifqani Nur Fauziah Hanif. *“Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik”*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, dikunjungi pada 1 Februari 2022: 18.45 WIB.

Riki Perdana Raya Waruwu, *“Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma”*, <https://jdih.mahkamahagung.go.id>, dikunjungi pada 20 April 2023 Jam 14.03 WIB.